

BABAK ANYAR KORUPSI DANA HIBAH DI JATIM

KPK TETAPKAN 12 TERSANGKA BARU, 4 ORANG BERSTATUS ANGGOTA DEWAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sedikitnya 12 tersangka baru dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kejutannya, 4 orang diantaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Diketahui, politisi Partai Golkar itu divonis 9 tahun penjara dan didenda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Meski hingga berita ini dibuat belum diungkapkan secara detil nama-namanya, tapi diketahui memang ada penggeledahan di Jatim. Salah satunya PDIP Bangkalan yang membenarkan komisi anti-rasuah menggeledah rumah salah satu kadernya, anggota DPRD Jatim, Mahfud. Mahfud merupakan anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim XIV (Madura).

Baca di hal 11....

FAKTA-FAKTA KORUPSI

DANA HIBAH DI JATIM



10 JULI 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 12 tersangka baru dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). 4 orang diantaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.



AWAL KASUS

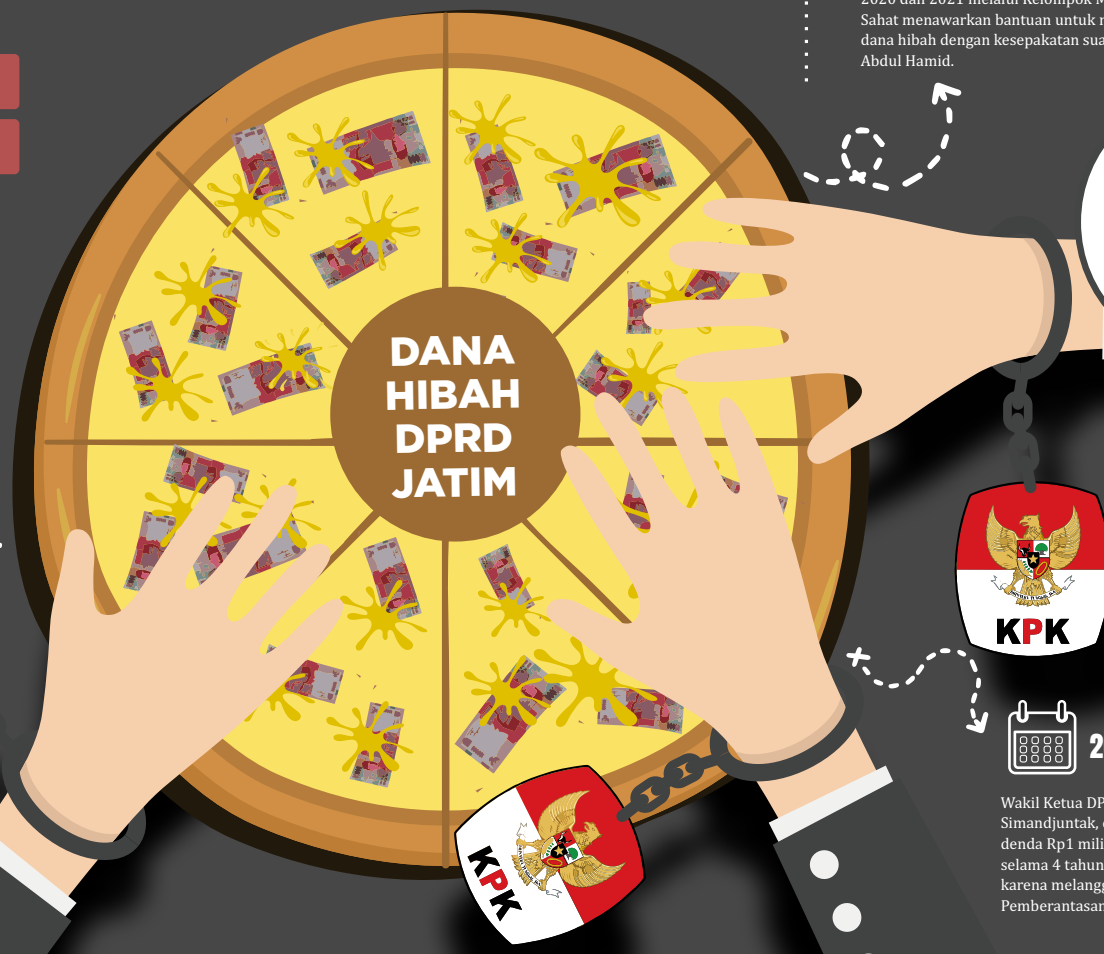
Sahat Tua Simanjuntak tertangkap OTT KPK pada Desember 2022 karena menerima suap untuk memuluskan pencairan dana hibah Pokmas. Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi telah divonis 2,5 tahun penjara sebagai justice collaborator.



KONTRUKSI KASUS

Pemprov Jatim merealisasikan dana hibah Rp7,8 triliun pada 2020 dan 2021 melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas). Sahat menawarkan bantuan untuk memperlancar pengusulan dana hibah dengan kesepakatan suap, yang diterima oleh Abdul Hamid.

**POLITIC (Hal.3)
Industri Tekstil RI
Gawat Darurat,
DPR Soroti PHK
10.800 Pekerja**



26 SEPTEMBER 2023

Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak, divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Hak politiknya dicabut selama 4 tahun setelah masa pemidanaan, karena melanggar UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Soal Titah Luhut Batasi BBM Subsidi Airlangga Sebut Belum Diputuskan, Erick Thohir Tunggu Perpres 191

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Hal ini menanggapi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM subsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. "Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir, dalam kesempatan terpisah, mengatakan dia menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu. Namun, Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN bukan kementerian yang membuat kebijakan.

"Perpres 191 kita masih nunggu belum turun," kata Erick Thohir. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Tak hanya soal subsidi BBM, sebut Erick, Kementerian BUMN juga mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

"Kami dari BUMN sangat mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian, apakah Perpres 191, 40, dan lain-lain, supaya tadi kita bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita," kata Erick.

Sejak kemarin, bergulir rencana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Wacana itu diungkapkan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Eks Menko Polhukam itu bilang



(Ilustrasi) Pembelian bahan bakar bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina. (Dok)

pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memprediksi realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi diperkirakan

juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs, dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

Realisasi subsidi dan kompensasi BBM per semester I 2024 tercatat sebesar 7.164,2 ribu kiloliter (KL). Sementara untuk realisasi periode yang sama pada 2023 sebesar 7.167,7 ribu KL. Artinya, realisasinya naik tipis 0,05 persen.

Sinyal Harga Naik?

Ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus tahun ini, sebagai sinyal kenaikan harga.

Ia mengatakan, pemerintah sudah tidak bisa menanggung beban subsidi energi, sehingga pembelannya dibatasi dan pada akhirnya harga harus dinaikkan.

Saat ini, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi harga minyak yang membuat anggaran subsidi BBM membengkak.

"Artinya, sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi yaitu pertalite dan solar," kata Faisal kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia menerangkan, saat ini harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) memang masih berada dalam perhitungan pemerintah, yakni 82 dolar AS per barrel. Tapi jika harganya kembali naik, maka kenaikan harga BBM juga sangat mungkin terjadi.

"Kan sudah mulai, pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak lagi dinaikkan. Ini naik terus, misalnya sekarang sih harga minyak anteng di 80 dolar AS per barel, kalau naik lagi ke 90 dolar AS per barel artinya subsidiya naik," ujarnya.

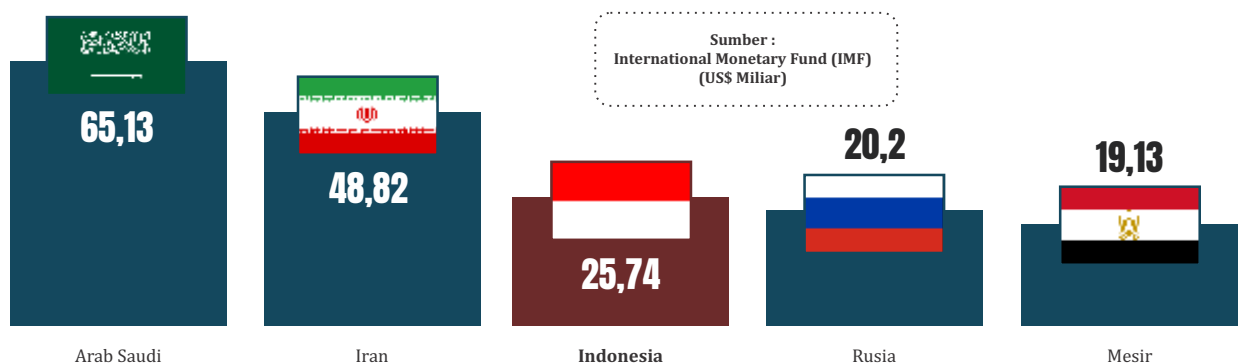
Naiknya harga ICP, lanjutnya, juga membuat dana kompensasi yang dibayarkan pemerintah ke Pertamina juga membengkak. Lantas Pertamina harus menjual Pertalite dan Solar di bawah harga pasar.

Terpisah, pemerintah sedang mengkaji mekanisme pengawasan penyaluran BBM subsidi untuk taksis daring atau online. Hal ini masuk dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

"Itu sedang dicari dan digodok mekanismenya bagaimana," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi saat ditemui di Kementerian ESDM pada Rabu (10/7).

Agus mengatakan pemerintah saat ini masih terus membahas pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi, baik dari jenis ataupun kapasitas mesin kendaraan. (wid,rls,ist,ant/dya)

5 NEGARA DENGAN SUBSIDI BBM* TERBESAR DI DUNIA (2022)



Industri Tekstil RI Gawat Darurat DPR Soroti PHK 10.800 Pekerja

JAKARTA- Komisi VII DPR RI turut menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tanah Air. Disebutkan, setidaknya ada 10.800 pekerja tekstil yang sudah menjadi korban PHK.

Karena itu, Komisi VII DPR memanggil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, hingga Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdian dalam rapat yang digelar di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Rapat itu membahas permasalahan terpuruknya industri tekstil nasional. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi tersebut, API diminta menjabarkan kondisi terkini dan permasalahan yang dihadapi industri TPT di dalam negeri.

Bambang juga meminta pengusaha tekstil menyampaikan usul dan rekomendasi strategi yang dapat ditempuh untuk membantu industri TPT yang sedang terpuruk. Termasuk strategi menaikkan kinerja industri TPT di Tanah Air. Bambang mengatakan, pihaknya juga akan membentuk Panja untuk menangani persoalan tersebut.

"Industri TPT sedang mengalami perlambatan pertumbuhan diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jumlah serapan tenaga kerja di industri TPT cenderung terus menurun. Saat ini jumlahnya mendekati 3 juta orang, menurun dibanding 2019 yang pernah menyerap hingga 3,5 juta orang," kata Bambang.

"Seiring dengan kondisi geopolitik global saat ini, keberlangsungan industri TPT masih terus menghadapi berbagai ancaman. Utilisasi di hulu maupun hilir semakin menurun. Hal ini juga terkait adanya ketidak-efisienan produksi, kapasitas di bawah 50%," tambahnya.

Sementara itu, lanjut Bambang, beberapa komponen produksi terus meningkat. Di tengah ketergantungan impor bahan baku. Akibatnya, daya saing industri TPT di dalam negeri semakin rendah.

"Kami juga mendapat laporan gelombang PHK di beberapa pabrik tekstil nasional sebagai inefisiensi produksi (utilisasi rendah). Berdasarkan data API, di pusat-pusat industri yang berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, total PHK sejak awal hingga akhir tahun 2023 mencapai 7.200 tenaga kerja. Dan sejak awal tahun hingga Mei 2024, ada PHK bertambah sekitar 3,600 tenaga kerja," paparnya.

"Sehingga, total keseluruhan PHK ada sekitar 10.800 tenaga kerja. Oleh karena itu, Komisi VII DPR meminta



Asosiasi Pertekstilan Indonesia menjelaskan permasalahan yang dihadapi industri TPT saat ini," kata Bambang.

Keluh Kesah Pengusaha

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja menegaskan bahwa kondisi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional saat ini sedang dalam situasi gawat darurat, di mana Indonesia dikhawatirkan menjadi dumping heaven produk-produk asal China.

Hal itulah yang disinyalir menjadi biang kerok maraknya penutupan pabrik tekstil, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 13.000 orang.

Mulanya Indonesia menjadi target dumping produk China, kata Jemmy, karena di China sendiri mereka kelebihan produksi yang diakibatkan oleh daya beli berbagai negara menurun. Sehingga, barang atau produk-produk yang tidak terjual itu dibuang ke Indonesia dengan harga yang sangat murah.

"Dunia sedang tidak baik-baik saja, China over production diakibatkan oleh daya beli berbagai negara yang turun, kita tahu bahwa Fed rate masih di kisaran 5,5%. Tapi kita harus waspada, jangan sampai Indonesia jadi dumping heaven. Jadi produk-produk yang tidak terjual di berbagai negara itu dibuang ke Indonesia," kata Jemmy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, industri TPT nasional tidak akan sanggup jika harus melawan produk-produk dumping atau barang sisa ekspor yang dijual dengan harga sangat murah.

"Kalau mungkin banyak orang berpikir, kenapa Indonesia tidak berdaya saing? Kita masih bisa bersaing, tapi kalau kita harus

fokus untuk menyelesaikan masalah utama yang menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik.

"Semakin lama berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil semakin memburuk, karena permasalahan utamanya jelas impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," ungkap Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dalam siaran pers yang diterima, Rabu (10/7/2024).

Untuk kesekian kalinya, APsyFI meminta pemerintah membereskan kerja buruk Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang membiarkan modus impor borongan, pelarian harmonized system (HS), hingga under invoice yang terjadi di depan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik.

Terpisah, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdian menyatakan, pemberantasan barang impor ilegal yang beredar di pasar adalah bagian dari apa yang dituntut oleh kalangan pengusaha IKM.

Di sini, IPKB melihat Kemendag sangat paham bahwa permasalahan utamanya adalah barang impor ilegal, sehingga dengan kewenangannya Kemendag berupaya menyelesaikan permasalahan sektor tekstil dan pakaian jadi.

Namun, IPKB tetap mengingatkan bahwa permasalahan utamanya adalah masuknya barang impor ilegal di pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Bea Cukai di bawah naungan Kemenkeu.

"Kami minta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas apa yang menimpa kami, PHK dan penutupan pabrik yang terjadi di mana-mana akibat ulah oknum pejabat dan petugas Bea Cukai yang memfasilitasi importir pedagang dan perusahaan logistik nakal untuk terus menjalankan praktik importasi ilegal," pungkask Nandi.(tro,ktn,rls,ist/dya)

melawan produk-produk sisa, pasti kita tidak bisa melawan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jemmy mengungkapkan bahwa China mengalami penurunan ekspor produk pakaian jadi ke berbagai negara sampai dengan 27%, di mana rata-rata penurunan ekspor produk China sebesar 6,41%.

"Ini penurunannya cukup tajam," lanjut dia.

Dampaknya, China mengirimkan barang over-stocked nya tersebut ke negara yang perlindungan dagang di dalam negerinya lemah, seperti Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan harga yang signifikan antara barang yang diekspor ke Indonesia dari China, dibandingkan ke negara tujuan lainnya seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Jerman.

"Ada selisih yang cukup dalam. Terdapat 31 dari 44 kode HS yang harga ekspor China ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan ke negara lainnya pada tahun 2023," pungkasknya.

Pelaku usaha pertekstilan meminta kebijakan importasi yang melibatkan perseteruan beberapa Kementerian segera dihentikan. Pemerintah diharapkan

JUMLAH PEKERJA INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA SKALA BESAR DAN MENENGAH (2018-2022)

No.	Nama Data	Pekerja Industri Tekstil Skala Besar	Pekerja Industri Tekstil Skala Menengah
1	2018	562.982	66.316
2	2019	517.212	64.023
3	2020	463.921	55.378
4	2021	347.535	43.472
5	2022	367.720	49.161

Sudah Sebulan Ketua DPRD Rembang Ditahan di Saudi Diduga Akibat Pakai Visa Ziarah, Pemkab Surati Kemlu

REMBANG-Sebulan sudah Ketua DPRD Rembang, Supadi, dikabarkan ditahan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu sejak 9 Juni 2024 lalu. Sekda Kabupaten Rembang mangarakan bersurat ke Kemlu untuk menanyakan status terkini Supadi, termasuk proses hukum yang bakal dijalani.

Kabar beredar, penahanan itu setelah Supadi terjaring razia oleh otoritas Arab Saudi saat di Kota Makkah karena melanggar peraturan keimigrasian.

"Kami sebelumnya juga bersurat [ke Kemlu]. Sedangkan hari ini kembali mengirimkan surat ke Kemlu terkait kasus hukum yang dihadapi, serta lamanya proses hukum yang bakal dijalani," kata Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo, Rabu (10/7/2024).

Surat balasan dari Kemlu itu nantinya akan jadi dasar pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Rembang untuk menunjuk Plt Ketua DPRD Rembang. Sedangkan untuk saat ini, kata Nur, masih ada tiga wakil ketua DPRD Rembang yang bertugas memimpin sidang.

"Penunjukan Plt Ketua DPRD akan disampaikan kepada Fraksi PPP untuk mengusulkan nama yang akan diputuskan di sidang paripurna," tuturnya.

Dalam AD/ART DPRD Rembang diatur jika unsur pimpinan DPRD tidak hadir selama 30 hari tanpa keterangan, penunjukan Plt Ketua DPRD bisa dilakukan.

Nur mengungkapkan, Supadi sempat mengajukan cuti haji mulai 31

Mei 2024 hingga 25 Juni 2024. Surat izin itu sudah diajukan ke Kemendagri dan disetujui.

Jika berdasarkan surat tersebut, seharusnya Supadi sudah kembali sejak akhir bulan lalu dan mulai ke kantor lagi pada 26 Juni 2024. Namun hingga saat ini Supadi masih hilang kontak.

"Informasi sebelumnya dari Kemlu RI disebutkan bahwa pada 9 Juni 2024 [Supadi] ditahan oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi," tutur Nur.

Menurut keterangan, Supadi telah menjalani sidang di Saudi pada 3 Juli 2024 lalu dan telah mendapatkan pendampingan hukum dari Kemlu RI. Namun tak dijelaskan kasus hukum apa yang menjerat Supadi di Saudi.

PPP Komunikasi dengan KBRI

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Rembang M Bisri Cholil Laqouf mengatakan, Supadi terkena razia keimigrasian karena menggunakan visa ziarah pada 9 Juni 2024. "Ya, itu jelas (melanggar keimigrasian), karena secara visa itu visa ziarah, di tanggal 23 Mei itu sudah ditutup untuk ziarah dan sebagainya, dan digunakan untuk haji, mulai tanggal 23 Mei," ujarnya.

"Dia masuk di tanggal 3 (Juni) atau 4 (Juni) pakai visa ziarah, dan di tanggal 9 Juni kena razia," imbuh pria yang akrab disapa Gus Gipul ini.

Menurutnya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah memberikan bantuan hukum kepada politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

tersebut.

"Dalam hal ini saudara Supadi sudah diberi bantuan hukum dan dikawal untuk di konjennya selalu aktif komunikasi dengan kepolisian Arab Saudi supaya tidak sampai ke pengadilan keputusan inkrah," jelas dia

Gus Gipul mengatakan Supadi sudah menjalani sidang pertamanya pada Rabu (3/7/2024). Agenda sidang pertama itu yakni pembacaan dakwaan.

Gus Gipul menerangkan, Supadi dijadwalkan akan kembali menjalani sidangnya yang kedua pada Kamis (11/7/2024).

"Dari Pelayanan Pelindungan Warga Negara Indonesia, kita tadi di Kemlu ketemu sama Mas Baihaqi yang ngurusi ini. Kemarin tanggal 3 (Juli) informasi yang didapat itu sudah sidang mendengarkan dakwaan. Jadi untuk nanti kelanjutannya belum tahu. Kemungkinan juga tanggal 11 (Juli) untuk sidang kedua," tutur Gus Gipul.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku baru mendapat informasi soal kadernya yang ditahan di Saudi itu dari pemberitaan yang ramai. Awiek—panggilan akrab Achmad—menyebut ia sudah langsung mengkonfirmasi kabar itu ke DPW PPP Jateng.

"Memang kepulauan Ketua DPRD



Tiga Wakil Ketua DPRD Rembang melakukan koordinasi dengan Kemlu di Gedung Pelayanan Pelindungan Warna Negara Indonesia, Selasa (9/7/2024). (dok. Wakil Ketua DPRD Rembang M Bisri Cholil Laqouf)

Rembang pada musim haji ini tertunda. Nah, tertundanya masalah apa, sedang kami konfirmasi. Sampai hari ini teman-teman di Jawa Tengah sedang mengkomunikasikan melalui kementerian agama ke konsulat jenderal di Jeddah maupun di KBRI di Riyadh," kata Awiek di Jakarta.

Ia juga mengaku belum mendapatkan informasi jelas tentang keberadaan Supadi atau kasus yang menyimpannya. Ia memastikan akan segera menelusuri nasib Supadi.

"Karena lost contact, namanya lost contact kita enggak bisa mengkonfirmasi dia di mana. Tapi yang jelas kepulangannya tertunda, itu yang sedang ditelusuri kenapa," tutur Awiek.(wid,tro,ant,dtc/dya)

Gaduh Pengalihan Kuota Haji, Pansus Angket Haji Temukan Indikasi Korupsi



Petugas membantu seorang haji asal Provinsi Papua turun dari bus setibanya di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/7/2024).(antara)

JAKARTA -Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami

juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

"Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi," ucap dia.

Untuk mendalami indikasi itu, kata Luluk, Pansus Angket Haji DPR RI akan memanggil para pihak terkait. "Kami akan dalam dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti," ucapnya.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR

RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setuju?," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.

Setelah menerima jawaban setuju, Muhaimin pun berkelakar bahwa para anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu. Adapun Komisi VIII DPR menjadi komisi yang membidangi permasalahan haji.

Muhaimin mengatakan pula bahwa pembentukan pansus itu

beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Sementara itu Anggota DPR perwakilan pengusul Hak Angket Haji Selly Andriany Gantina mengatakan Hak Angket merupakan Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Dia mengatakan para pengusul menilai bahwa pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.(ant,tro,ist/dya)

Maju Pilkada, Pj Kepala Daerah Wajib Mundur Maksimal 17 Juli

JAKARTA- Penjabat (Pj) kepala daerah tidak dilarang untuk ikut Pilkada serentak 2024. Namun, mereka diingatkan, wajib mengundurkan diri paling lambat 17 Juli 2024 atau maksimal tujuh hari ke depan.

Mendagri Tito Karnavian mulanya mengatakan dia sudah menerima 10 surat pengunduran diri dari Pj kepala daerah yang akan maju pilkada.

"Saya sudah terima lebih kurang ada 10 yang nyatakan undur diri untuk ikut running. Nggak apa-apa," ujar Tito acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2024 di JCC Senayan, Rabu (10/7/2024).

Dijelaskan Tito, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 100.2.1.3/2314/SJ bertanggal 16 Mei 2024. Edaran itu berisi ketentuan Pj kepala daerah mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran di KPU.

Menurutnya Kemendagri mesti memproses pengunduran diri dengan mencari Pj kepala daerah pengganti. Di sisi lain, Tito mengimbau Pj Kepala Daerah tetap bekerja di daerah masing-masing hingga pengunduran diri disetujui.

"Karena kami butuh waktu menyiapkan pengganti. Harus surati DPRD, surat gubernur untuk bisa mendapatkan masukan, surat kementerian lembaga, sidang Pra-TPA dengan KPK, PPATK, ada masalah hukum nggak. Jadi paling lambat tanggal 17 Juli tolong yang akan running, Pj yang jumlahnya 276 nih Pj," terangnya.

"Bagi yang mengundurkan sebelum keluar SK ya tetap bekerja. Bukan pas ngundurin diri selesai, nggak. Mundur itu permohonan, setelah itu SK, sebelum Keppres keluar baru berhenti sebagai Pj-nya. Jadi tetap bekerja," sambungnya.

Karena itulah dia berpesan ke Pj kepala daerah untuk paling lama menyerahkan surat pengunduran diri 17 Juli jika maju pilkada.

"Khusus untuk Pj saya minta diberi tahu, deadline-nya adalah 17 Juli. Jadi 40 hari sebelum masa pendaftaran 27 Agustus," katanya.

Di sisi lain, Tito mengatakan para kepala daerah definitif yang memutuskan maju kembali di Pilkada 2024 untuk mengambil cuti. Ia juga meminta para anggota DPR RI dan anggota DPRD wajib mundur dari posisi legislatifnya jika maju Pilkada.

"Anggota legislatif kan ikut Pileg ingin jadi wakil rakyat, ketika dia pindah jalur ke eksekutif dia harus mundur," kata dia.

Usul Pelantikan 3 Tahap

Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar pelantikan kepala daerah terpilih hasil



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi pembicara utama pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024). (ist)

Pilkada 2024 dapat digelar dalam tiga tahapan. Tito mengatakan, pelantikan mustahil digelar serentak untuk semua daerah karena pasti ada calon kepala daerah yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Fakta di lapangan, setelah 27 November (pilkada) nanti ya enggak semua menerima (hasilnya). Mungkin ada yang tidak setuju, dan haknya untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," kata Tito dalam kesempatan yang sama.

Tito menjelaskan, tahapan pertama adalah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar pada 1 Januari 2025.

Hal itu merujuk kepada aturan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 berakhir masa jabatannya paling lambat pada 2024.

Menurut Tito, ketentuan itu diterjemahkan menjadi paling lambat 31 Desember 2024. "Nah bagi kepala daerah (terpilih) yang enggak ada sengketa, enggak ada yang gugat, ngapain lama-lama. 31 Desember selesai berkahir sesuai UU, (maka) 1 Januari ya enggak ada masalah gugat-gugat ini lantik aja serentak. Semua. Sehingga tak terjadi kekosongan," kata Tito.

Kemudian, tahapan pelantikan kedua diusulkan bagi peserta pilkada yang masih melakukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK.

Jika merujuk kepada masa gugatan selama 45 hari, maka pelantikan gelombang kedua bisa dilakukan pada Februari 2025. Lalu, untuk usulan pelantikan pilkada tahap ketiga diperuntukkan bagi daerah yang pelaksanaan pilkada-nya berlarut-larut.

"Misalnya di Yalimo, ada selama 1 tahun 3 bulan. Dimulai dari nol lagi,

dari pendaftaran ulang bayangkan. Kemudian juga di Kalimantan Selatan juga cukup lama lebih dari 6 bulan. Nah ini untuk gelombang ketiganya," kata Tito.


Mantan kapolri itu menyebutkan, tiga tahapan tersebut akan lebih dulu dikonsultasikan ke Komisi II DPR sebelum diputuskan oleh pemerintah. "Itulah kira-kira skenario yang akan kita sampaikan ke DPR Komisi II. Tapi kalau rekan-rekan ada masukan lain tolong disampaikan ke saya, ke Plt Sekjen Kemendagri atau ke Staf Ahli Kemendagri," kata Tito.


Tito menambahkan, usul tiga tahapan pelantikan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Di dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 itu ada aturan tentang pelantikan serentak. Nah pelantikan serentak ini diamanatkan tujuannya adalah supaya kepala daerah terpilih itu tidak jauh dilantiknya dengan masa pelantikan presiden. Sehingga bisa paralel. Lima tahunan," ujar Tito.


Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia. Hal itu diatur di dalam Pasal 165 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) yang menyatakan bahwa tata cara dan jadwal pelantikan serentak diatur melalui peraturan presiden.


"Pertanyaannya, kapan sebenarnya pelantikan ini? Kita tunggu saja kapan perpresnya (peraturan presiden) terbit," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (8/7/2024). (wid,tro, rls,ant/dya)


JADWAL LENGKAP PILKADA 2024

 **27 Februari - 16 November 2024:** Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;


 **24 April - 31 Mei 2024:** Penyerahan daftar penduduk potensial pemilihan;


 **5 Mei - 19 Agustus 2024:** pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan


 **24-26 Agustus 2024:** pengumuman pendaftaran pasangan calon


 **27-29 Agustus 2024:** pendaftaran pasangan calon

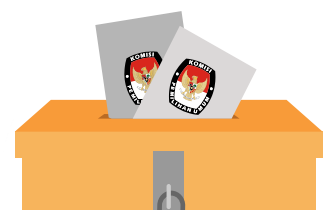
 **27 Agustus - 21 September 2024:** penelitian persyaratan calon

 **22 September 2024:** penetapan pasangan calon

 **25 September - 23 November 2024:** pelaksanaan kampanye

 **27 November 2024:** pelaksanaan pemungutan suara

 **27 November - 16 Desember 2024:** penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan.



Matangkan Konsep Angkutan Publik Buy The Service Pj Wali Kota Kembali Singgung Kesejahteraan Sopir



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat berdialog langsung dengan sopir angkot. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat ini tengah mematangkan kajian terkait konsep baru angkutan publik, Buy The Service (BTS). Konsep ini menimbulkan beragam respons dari para sopir angkot di Kota Malang. Mereka menagih janji peningkatan pendapatan dan kondisi armada yang lebih baik.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan konsep BTS dirancang sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ekonomi yang

dihadapi oleh para sopir angkot, akibat persaingan dengan layanan ojek online dan taksi daring yang semakin marak.

Wahyu menjelaskan, dengan konsep BTS, pemerintah akan menyediakan kendaraan memadai untuk digunakan oleh para sopir angkot. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial mereka, karena tidak lagi perlu memikirkan untuk membeli kendaraan baru atau mencicilnya.

"Kami sangat mendengarkan keluhan para sopir angkot, misalnya terkait rendahnya minat masyarakat ke angkutan kota saat ini. Nah dengan BTS, malah nanti kan rencananya sopir juga kami gaji sesuai UMK," ujar Wahyu, Rabu (10/7/2024).

Pj Wahyu menegaskan, proses pengembangan konsep BTS akan melibatkan partisipasi aktif dari para sopir angkot. Ia menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan seluruh pihak terkait.

"Saat ini, Pemkot Malang masih dalam tahap penyusunan kajian dari konsep BTS. Nanti kendaraan yang sudah ada saat ini masih dapat digunakan di luar rute BTS, dengan aturan yang akan ditetapkan lebih lanjut," tambahnya.

Meskipun demikian, respons dari para sopir angkot terhadap konsep ini tidak homogen. Wahono, salah satu sopir trayek Arjosari-Borobudur-Bunulrejo, menyampaikan kekhawatirannya terhadap implementasi nyata dari konsep BTS.

Menurutnya, yang dibutuhkan oleh para sopir adalah kebijakan yang dapat benar-benar meningkatkan pendapatan mereka, yang saat ini

masih jauh di bawah UMK.

"Dari dulu kami hanya mendengar wacana-wacana saja. Harapannya kali ini benar-benar ada realisasi sehingga ada solusi. Entah itu armada mobil baru atau bekas, sehingga gak hanya wacana saja," ujar Wahono.

Di sisi lain, Ferdi, sopir trayek AG, mengeluhkan dampak negatif dari persaingan dengan ojek online dan taksi daring yang memiliki izin resmi. Ia juga mencatat, kehadiran sebuah perusahaan otobus (PO) yang melayani trayek Blitar-Arjosari telah mengurangi jumlah penumpang angkot di rute tersebut, sehingga berdampak langsung pada pendapatan mereka.

Ferdi memberikan contoh dari kebijakan yang diterapkan di Yogyakarta, di mana terdapat pembatasan operasional untuk taksi dan ojek daring pada jam-jam tertentu. Ia berharap, dengan adanya BTS nanti, Pemkot Malang juga dapat mempertimbangkan pendekatan serupa untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi saat ini.

"Gak harus mobil baru, yang penting masalahnya diselesaikan," seru Ferdi. (Santi/Dya)

Pemkab Malang Gaungkan Gempur Rokok Ilegal Gaet Warga Lewat Gerak Jalan Sarungan dan Senam Malang Makmur

MALANG - Dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar acara Gerak Jalan Sarungan dan Senam Malang Makmur di Kecamatan Gondanglegi, Minggu (7/7/2024).

Kegiatan tersebut diadakan bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah dan diikuti oleh ratusan warga setempat. Kegiatan

ini merupakan bagian dari kampanye sosialisasi bahaya rokok ilegal yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, mengatakan acara ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat, terkait dampak negatif rokok ilegal.

"Jadi kalau dari Satpol PP, kami masuk dalam bagian penegakan hukum. Di sini kami ada tiga tugas besar yakni operasi bersama, pengumpulan informasi rokok ilegal, dan sosialisasi memberikan pemahaman tentang rokok ilegal,"

Pria yang akrab dengan sapaan Mando, ini menambahkan agenda Gempur Rokok Ilegal kali ini dikemas dalam bentuk kegiatan keagamaan dan olahraga. Guna menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Gondanglegi.

Dalam acara tersebut, Mando menyebutkan masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya rokok

ilegal, baik dari sisi kesehatan yang tidak terpantau laboratorium dan dampaknya terhadap pendapatan negara. Mando berharap melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami dan mengurangi konsumsi rokok ilegal.

Lebih lanjut, Mando juga menyoroti bahwa temuan rokok ilegal di lapangan masih cukup tinggi. Menurutnya, hal ini dikarenakan harga rokok ilegal yang lebih murah dibanding rokok konvensional, sehingga mudah dijangkau oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah.

"Hampir setiap kami melakukan operasi bersama, temuan akan rokok ilegal ini selalu didapatkan. Jadi masih banyak yang mengkonsumsi itu. Dan itu juga berdampak ke pendapatan negara," jelasnya.

Penegakan hukum terkait rokok ilegal, sambungnya, juga sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari masyarakat.



Bupati Malang, Sanusi saat membuka acara Gerak Jalan Sarungan di Kecamatan Gondanglegi, Minggu (7/7/2024). (Iskandar/Lenteratoday)

Namun, Mando menegaskan pihaknya akan terus berupaya mengedukasi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, menambahkan, Pemkab Malang mendapatkan bagian pajak dari rokok sebesar Rp 110 miliar di tahun ini, yang masuk ke APBD dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. (Santi/Dya)



Jadi kalau dari Satpol PP, kami masuk dalam bagian penegakan hukum. Di sini kami ada tiga tugas besar yakni operasi bersama, pengumpulan informasi rokok ilegal, dan sosialisasi memberikan pemahaman tentang rokok ilegal,"

FIRMANDO HASIROLAN MATONDANG
Kepala Satpol PP Kota Malang,



HARASHTA HAIFA ZAHRA Miss Supranational 2024

PUTERI Indonesia 2024 Harashta Haifa Zahra dinobatkan sebagai pemenang kontes kecantikan Miss Supranational 2024 yang digelar di Nowy Sącz, Polandia pada Sabtu (6/7).

Perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat ini berhasil mengalahkan finalis dari 71 negara, sekaligus menjadi Puteri Indonesia pertama yang memenangkan gelar di ajang kecantikan internasional Miss Supranational.

"Harashta Haifa Zahra (20) dari Kota Bandung, Jawa Barat dinobatkan sebagai Miss Supranational ke-15 di puncak pertunjukan final di Nowy Sącz Malopolska," tulis unggahan akun resmi Miss Supranational di Instagram dikutip pada Minggu.

Puncaknya, Harashta Haifa menjadi pemenang Miss Supranational 2024 mengalahkan kontestan dari 70 negara. Tata berhadapan dengan Isadora Murta asal Brazil sebelum akhirnya diumumkan sebagai pemenang.

Mahasiswi jurusan Teknik Lingkungan berusia 20 tahun itu mengungkapkan perasaan bahagia dan bangga setelah keluar sebagai pemenang kontes kecantikan internasional tersebut.

"Hal ini masih terasa tidak nyata dan saya tidak sabar untuk menjalankan tugas saya sebagai Miss Supranational yang baru. Ini akan menjadi tahun yang istimewa dan hari saya dipenuhi dengan kebanggaan. Terima kasih kepada negara saya atas dukungan kalian. Indonesia kita berhasil!," kata Harashta.

Sebelumnya, pada 8 Maret 2024 Harashta yang mewakili Provinsi Jawa Barat berhasil memenangkan ajang Puteri Indonesia 2024.

Puteri Indonesia 2023 Farhana Nariswari yang juga berasal dari Jawa Barat memahkotai Harashta sebagai pemenang baru di malam puncak kontes kecantikan nasional itu.

Diketahui, Miss Supranational adalah ajang kontes kecantikan internasional yang diselenggarakan oleh World Beauty Association secara rutin setiap tahun sejak 2009 silam.

Profil

Harashta Haifa Zahra merupakan perempuan asal Garut, Jawa Barat. Dia lahir pada 5 September 2003 atau kini usianya baru 20 tahun.

Lulusan SMA Negeri 2 Bandung ini kini masih kuliah di Institut Teknologi Nasional Bandung dengan Jurusan Teknik Lingkungan.

Sebagai mahasiswa Teknik Lingkungan, dia juga sangat peduli dengan lingkungan. Dia menginisiasi Mother of Nature di sosial mediana sebagai inisiatif untuk mengajak orang lain peduli lingkungan.

Di beberapa postingannya, dia ikut membersihkan sampah hingga membuka forum diskusi atau menjadi pembicara tentang peduli sampah.

Dalam kariernya di kontes kecantikan, dia pernah terpilih menjadi duta daerah Kota Bandung yakni Mojang Jajaka Kota Bandung 2022. Dia sebagai Wakil II sabagai Mojang Kota Bandung.

Pada 2024, dia pun berhasil terpilih sebagai Puteri Indonesia Jawa Barat yang akan maju ke Puteri Indonesia 2024.

Beruntungnya, lewat ajang Puteri Indonesia 2024, dia dinobatkan sebagai pemenang mengalahkan Puteri Indonesia asal Yogyakarta.

Setelah dari ajang Puteri Indonesia, ini artinya kesempatan untuk Tata untuk bisa bersaing dengan wanita cantik dan pintar dari negara-negara lain.

Paras cantik, bakatnya dalam modeling, serta kecerdasannya termasuk profesinya sebagai aktivis sangat mendukung dirinya untuk bisa bersaing dengan yang lainnya.

Kemenangan Tata dalam ajang ini juga berarti Jawa Barat yang berhasil meraih gelar Puteri Indonesia dua tahun berturut-turut.

Sebelumnya, Farhana Nariswari dari Jawa Barat juga berhasil meraih gelar Puteri Indonesia 2023, mencetak sejarah sebagai perwakilan pertama dari Jawa Barat yang meraih gelar tersebut sepanjang sejarah Pemilihan Puteri Indonesia (Antara/berbagai sumber)



KEBANYAKAN MAKAN OLAHAN DAGING BISA RUSAK RETINA

Orang-orang yang terlalu banyak mengonsumsi daging merah, daging olahan, makanan yang digoreng dan susu tinggi-lemak berisiko tiga kali lipat mengalami kondisi mata yang merusak retina dan mempengaruhi penglihatannya, menurut hasil penelitian dari University at Buffalo.

Kondisi tersebut, seperti dilansir Science Daily disebut degenerasi makula terkait usia lanjut (AMD). AMD tidak dapat dipulihkan dan mempengaruhi penglihatan sentral seseorang.

Untuk sampai pada kesimpulan ini, para peneliti mempelajari kejadian AMD selama sekitar 18 tahun pada peserta studi yang tergabung dalam Komunitas Berisiko Atherosclerosis (ARIC).

Shruti Dighe, dari departemen Epidemiologi UB's School of Public Health and Health Professions dan koleganya menggunakan 66 makanan berbeda yang dikonsumsi partisipan antara 1987 dan 1995.

Mereka mengidentifikasi dua pola diet dalam kelompok ini sebagai diet Barat dan apa yang biasa disebut oleh para peneliti sebagai diet sehat. Diet Barat diidentifikasi dengan konsumsi daging merah dan olahan, makanan yang digoreng dan produk susu tinggi lemak.

"Orang yang tidak memiliki AMD atau AMD awal pada awal penelitian

melaporkan sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, lebih mungkin mengembangkan penyakit tahap akhir yang mengancam penglihatan, sekitar 18 tahun kemudian," kata Amy Millen, salah satu peneliti studi.

AMD tahap awal tidak menunjukkan gejala sehingga membuat penderita seringkali tidak menyadarinya. Untuk mendeteksinya, dokter harus meninjau foto retina orang tersebut, mencari perubahan pigmen atau endapan kuning yang terbuat dari lipid.

"Ketika tahapnya lanjut, mereka akan mulai melihat gejala visual. Penglihatan mereka akan mulai berkurang," kata Dighe. etapi tidak semua orang yang memiliki AMD awal berkembang ke tahap akhir.

Sampai saat ini, penelitian telah memfokuskan pada nutrisi spesifik - seperti antioksidan dosis tinggi - yang tampaknya memiliki efek perlindungan terhadap AMD. Tapi, Dighe menjelaskan, orang mengonsumsi

berbagai makanan dan nutrisi, bukan hanya satu atau dua, dan itulah sebabnya melihat pola diet membantu. "jika Anda memiliki AMD dini, ada baiknya Anda membatasi konsumsi daging olahan, makanan yang digoreng, biji-bijian olahan dan susu tinggi-lemak untuk menjaga penglihatan Anda dari waktu ke waktu," saran Millen.

Daging olahan sebabkan kematian

Konsumsi terlalu banyak daging olahan, garam, soda dan kurang asupan kacang-kacangan merupakan sederet kebiasaan buruk penyebab kematian menurut jurnal JAMA.

Di Amerika, mayoritas kematian masyarakat (lebih dari 700 ribu) di sana akibat penyakit jantung, stroke dan diabetes, yang dipicu gaya hidup tak sehat tersebut (terlalu banyak konsumsi daging olahan, soda dan sedikit konsumsi kacang-kacangan).

Dalam sebuah studi, peneliti menemukan kebanyakan mereka yang meninggal juga kurang mengonsumsi asam lemak omega-3, buah-buahan

dan sayuran.

Salah satu penulis studi, Renata Micha mengatakan garam berhubungan dengan hampir 10 persen kematian. Sementara terlalu sedikit kacang-kacangan, biji-bijian dan seafood menyumbang sekitar 8 persen. (Berbagai Sumber)

“

Orang-orang harus batasi asupan garam sodium berhubungan dengan tekanan darah tinggi

- DR. LAKSMI MHTETA -



APPLE DIPREDIKSI UBAH KAMERA DI IPHONE 16, BAKAL LEBIH CANGGIH?

APPLE dikabarkan akan membawa perubahan besar pada kamera iPhone 16. Jika kabar ini benar, maka ini akan jadi momen desain ulang Apple yang pertama sejak 2013 silam.

Sebuah postingan yang diunggah oleh leaker di media sosial, memperlihatkan bahwa desain kamera iPhone seri berikutnya, berbentuk pil dan dibuat lebih ramping. Kamera iPhone ini disebut mampu merekam video spasial 3D yang bisa dilihat pakai headset Vision

Pro VR milik Apple.

Menurut laporan Daily Mail, seajarnya kamera yang disusun secara vertikal pada iPhone 16 dan 16 Plus ini memungkinkan smartphone untuk menangkap rekaman dari kamera utama dan ultra-wide secara bersamaan.

"(Fitur) video spasial kemungkinan akan ditambahkan," kata salah satu leaker Apple bernama Majin Bu di X.

Semua tipe, iPhone 16 hingga

iPhone 16 Pro Max, dikabarkan akan hadir dengan kamera ultra-wide angle 48 MP baru. Kamera ini diklaim lebih baik dalam urusan merekam video spasial.

iPhone 16 Pro dan Pro Max dirumorkan akan memiliki lensa 5X telephoto, serta sensor kamera yang di-upgrade. Ini akan menciptakan video spasial yang lebih detail dan bahkan mungkin video spasial dari jarak jauh.

Majin Bu dan pembocor lainnya juga telah melaporkan bahwa kamera

iPhone 16 Series bakal dilengkapi dengan coating anti-glare pada lensanya. Ini akan mengurangi efek kamera yang berbayang yang sudah lama ada pada kamera iPhone.

Namun, para ahli menyatakan bahwa iPhone 'bukti konsep' ini mungkin tidak 100 persen akurat.

Jadi, publik baru akan mengetahui secara pasti apakah gambar-gambar ini benar adanya ketika Apple secara resmi memperkenalkan lini iPhone barunya akhir tahun ini. (nei,ist/dya)





POLA PIKIR POSITIF BANTU ANAK BERADAPTASI DI SEKOLAH BARU

PSIKOLOG Klinis Anak dan Remaja dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengatakan pola pikir positif yang telah ditanamkan oleh orang tua di rumah, dapat membantu anak mudah beradaptasi di lingkungan sekolah barunya.

"Tanamkanlah pesan-pesan yang positif tentang sekolah. Misalnya sekolah jadi tempat menyenangkan karena banyak teman dan anak bisa bermain bersama," kata Vera Itabiliana Hadiwidjojo di Jakarta.

Dari kasus yang pernah Vera temui, ia menilai langkah tersebut dapat mencegah anak merasa tidak bahagia mengikuti pembelajaran di sekolah yang menimbulkan masalah seperti mogok masuk sekolah, menolak mengerjakan tugas, mengalami stres karena tuntutan akademis hingga bersosialisasi.

Guna mengantisipasi hal tersebut, orang tua perlu mempersiapkan mental anak dengan membentuk sebuah pola pikir positif yang berhubungan dengan kondisi di sekolah. Hindari pembicaraan yang dapat membebani pikiran anak.

"Hindari terlalu membebani anak seperti di sekolah harus jadi anak pintar, harus selalu bisa menjawab pertanyaan guru, harus dapat nilai bagus dan lain-lain. Usahakan agar anak merasa senang di sekolah tanpa beban yang berlebihan," ucap Vera.

Terkait adanya anak yang mulai masuk sekolah pada usia kurang dari 6 atau 7 tahun, Vera juga menyarankan supaya orang tua tidak lupa menceritakan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan agar anak merasa lebih nyaman untuk tinggal di sekolah dalam waktu yang lama.

Hal tersebut, katanya, dapat mulai diajarkan lewat datang ke sekolah lebih awal sehingga anak mempunyai kesempatan lebih lama untuk beradaptasi sebelum kelas dimulai.

"Kemudian jangan lupa berkenalanlah dengan satu atau dua orang tua lainnya, untuk kemudian mengatur playdate bagi anak dan teman-teman sekolahnya di luar jam sekolah," kata Vera.

Sedangkan dari sisi kemandirian, orang tua dapat memastikan anaknya sudah dapat mengurus dirinya sendiri

seperti pergi ke toilet, memakai sepatu atau makan bekal sendiri hingga menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum mulai proses belajar.

Vera menambahkan orang tua juga perlu memastikan anak dapat mengerti aturan yang dibuat oleh sekolah seperti waktu penggunaan gawai, membereskan mainan di kelas dan memahami batasan-batasan yang ada di ruang kelas.

Kurangi stres

Sementara itu, psikolog anak dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia Fabiola Priscilla M Psi mengatakan kiat mengatasi tekanan menjelang hari pertama anak bersekolah setelah libur panjang.

Persiapan tersebut antara lain, mengalokasikan waktu tidur anak yang cukup antara delapan sampai 10 jam hingga menciptakan jadwal rutinitas pagi yang konsisten agar anak dapat berangkat sekolah di hari pertama dan seterusnya dengan lebih percaya diri, ujarnya.

"Melakukan berbagai macam persiapan sekolah dengan matang

dapat membantu mengajarkan keterampilan hidup yang penting pada anak seperti kemandirian, tanggung jawab dan manajemen waktu," kata Fabiola dalam seminar mengenai "kiat-kiat mengatasi stres pada orang tua dalam mempersiapkan anak kembali sekolah" di Jakarta.

Peran orang tua dalam mendukung anak menjelang hari pertama ajaran baru menjadi sangat penting, karena itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak dan akan menjadi pondasi dalam proses pembelajaran mereka di masa yang mendatang.

Tahun ajaran baru berarti teman, guru, dan ruang kelas baru. Berapapun usia mereka, banyak anak yang khawatir untuk mulai bersekolah atau kembali ke sekolah.

Wajar jika anak-anak (dan orang tua mereka) merasa cemas untuk kembali ke sekolah. Kabar baiknya adalah ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu bersiap menghadapi tahun ajaran baru (Antara



-Vera Itabiliana hadiwijojo -

Tanamkan lah pesan pesan yang positif tentang sekolah .misalnya sekolah jadi tempat menyenangkan karena banyak teman dan anak bisa bermain bersama

Babak Anyar Korupsi ... (dari Hal 1)

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021.

"Dari anggota DPRD ada empat orang (tersangka), kalau enggak salah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/7/2024)).

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan tim penyidik KPK membenarkan pihaknya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jawa Timur.

Namun, Tessa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah maupun apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.

"Masih menunggu kegiatan rekaman di lapangan selesai ya," ujar Tessa.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak hukuman 9 tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman kurungan selama 6 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," ucap Suardhita.

Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar pasal 12 a juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemerintahan bersih dari korupsi dan memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa belum mengembalikan uang yang dikorupsi.

"Sedangkan hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi," ucap ketua majelis hakim I Dewa Suardhita.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa dicabutnya hak politik Sahat Tua P Simandjuntak, yakni dilarang untuk menduduki dalam jabatan publik selama 4 tahun

terhitung sejak terpidana selesai menjalani masapemidanaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto menerima vonis, meski lebih rendah dari tuntutan.

"Kami merasa putusan yang dijatuhkan hakim ini memenuhi rasa keadilan di masyarakat jadi kami memutuskan untuk menerima putusan yang mulia," ucap Arif.

Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum), menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.

Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas). Sepanjang 2020 hingga 2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan olehnya.

Sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Keduanya mendapat vonis yang cukup ringan karena statusnya sebagai justice collaborator.

Dalam kontruksi kasusnya, Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Pemprov Jatim pada tahun 2020 dan 2021.

Distribusi penyalurannya antara lain melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan. Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dan usulan dari para anggota DPRD Jatim, salah satunya adalah Sahat.

Sahat menawarkan diri membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka alias ijon. Kemudian Abdul Hamid menerima tawaran tersebut.

Diduga Sahat mendapat bagian 20 persen dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan sedangkan Abdul Hamid mendapatkan bagian 10 persen. Adapun besaran nilai dana hibah yaitu pada tahun 2021 dan 2022 telah disalurkan masing-masing sebesar Rp 40 miliar.

Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan 2024 dapat kembali diperoleh Pokmas, Abdul Hamid kemudian kembali menghubungi Sahat dan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan sebesar Rp 2 miliar.

Penggeledahan di Bangkalan

KPK diketahui melakukan penggeledahan di Jawa Timur. PDIP Bangkalan membenarkan KPK menggeledah rumah salah satu kadernya, anggota DPRD Jatim, Mahfud.

Mahfud merupakan anggota

DPRD Jatim dari Dapil Jatim XIV (Madura). Penggeledahan dilakukan di rumah yang berada di Bangkalan.

"Iya betul ada, tapi bukan OTT hanya penggeledahan," kata Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman, Rabu (10/7/2024).

Ia mengatakan penggeledahan dilakukan di salah satu rumah Mahfud di perumahan Istana Megah Cemerlang (IMC) di Jalan Soekarno Hatta, Bangkalan. "Untuk peng-geledahan di rumahnya yang IMC," jelasnya.

Riset Puskapol UI soal Korupsi

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengungkapkan, perempuan yang menjadi pejabat politik cenderung lebih hati-hati dalam menerima korupsi. Direktur Puskapol UI, Hurriyah mengatakan, kesimpulan itu merujuk pada riset terhadap ratusan anggota KPU, Bawaslu, hingga DPR di tingkat pusat maupun daerah.

"Karena mereka lebih menempatkan pada pertimbangan moral, norma, dan juga beban domestik yang melekat pada perempuan," kata Hurriyah dalam acara diskusi di Tebet, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Hurriyah, partisipan risetnya menyebut beban yang ditanggung perempuan akibat terjerat kasus korupsi lebih berat daripada laki-laki. Ia pun mencontohkan, dalam kasus anggota DPR RI Angelina Sondakh dan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah misalnya, pelaku perempuan lebih disorot media publik daripada pelaku laki-laki.

"Kasus laki-laki sedikit yang di-blow up," ujar Hurriyah. Padahal jumlah laki-laki yang terjerat kasus korupsi lebih banyak daripada perempuan. Misalnya, 18 kasus korupsi di KPU sepanjang 2003-2019, hanya terdapat 1 perempuan yang terlibat. Sementara, 29 orang lainnya laki-laki.

Kemudian, dari 13 kasus korupsi di Bawaslu sepanjang 2013-2023, 13 di antaranya merupakan laki-laki sementara 4 pelaku perempuan. Sebanyak 11 pelaku tidak diketahui identitasnya.

Sementara, dari 76 kasus korupsi di DPR RI sejak 2004 hingga 2023, pelaku laki-laki berjumlah 62 orang sementara perempuan 11 orang. Baca juga: Perempuan, Korban Paling Menderita akibat Praktik Korupsi, Ini Pencegahannya "62 berbanding 11. Jadi kurang lebih enam kali lipat. Perempuan 5 kali lebih rendah," kata Hurriyah.

Hurriyah menuturkan, berdasarkan penelitiannya, jumlah laki-laki lebih banyak terjerat tidak terlepas karena dominasi patronase laki-laki. Banyaknya laki-laki yang menjadi pemegang kekuasaan menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi.

Menurut dia, data ini dapat menjadi pintu masuk bagi organisasi masyarakat sipil untuk mendorong perempuan semakin banyak menempati posisi strategis di DPR RI dan DPRD. "Temuan kami juga meng-

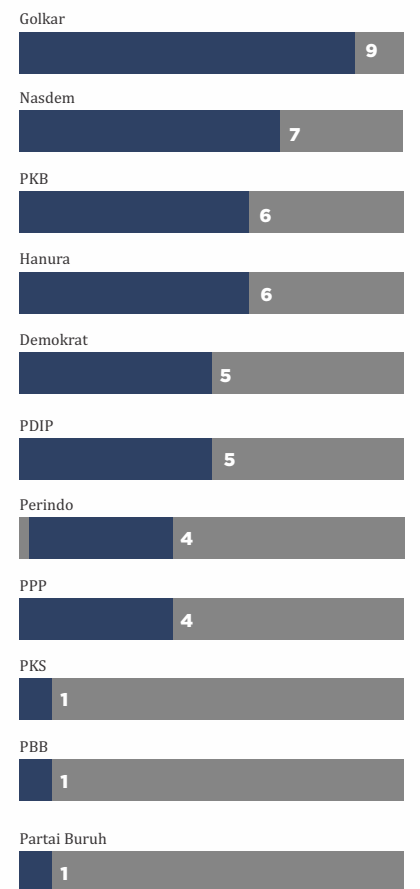
konfirmasi temuan studi terdahulu terkait jaringan patronase laki-laki ternyata justru berdampak pada meningkatnya korupsi dan juga membatasi partisipasi perempuan," ujar Hurriyah.

Survei dilakukan terhadap 205 anggota KPU dan Bawaslu provinsi dengan mempertimbangkan demografis responden. Selain itu, Puskapol UI juga melakukan wawancara mendalam terhadap enam kategori informan yang meliputi, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu RI, anggota KPU dan KPI, anggota Bawaslu, serta akademisi dan aktivis. Hurriyah menjelaskan, dalam penelitian ini pihaknya menggunakan pendekatan psikologi politik untuk melihat kecenderungan individu dalam melakukan korupsi dan antikorupsi.

"Kami tertarik untuk melihat apakah perempuan secara psikologis akan cenderung tidak mau terlibat dalam tindak korupsi," ujar dia.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus). Fakta, mereka yang terlibat korupsi yaitu mulai anggota hingga pimpinan DPR/DPRD. (wid,tro,lufi,pra,ist/dya)

JUMLAH CALEG MANTAN NAPI KORUPSI DALAM DCT PEMILU 2024 BERDASARKAN PARTAI (NOVEMBER 2023)



Usai Hasyim Asy'ari Dipecat Tak Hormat, Muncul Wacana Penambahan Anggota KPU

JAKARTA- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berbicara soal penambahan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca diberhentikannya Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua KPU RI. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy'ari pada 9 Juli 2024.

Ma'ruf membuka opsi dilakukan penambahan anggota KPU menyusul diberhentikannya Hasyim Asy'ari yang menyebabkan jumlah komisioner KPU berkurang satu. "Saya kira dikuatkan saja KPU yang ada. Dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan gimana, sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan. Kemudian yang ada kalau perlu ditambah misalnya karena ada yang satu keluar, ya ditambah," kata Ma'ruf di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari video antara, Rabu (10/7/2024).

Namun, Ma'ruf menyebut, dengan komposisi anggota KPU pusat yang ada saat ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dia juga menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik.

"Tapi dengan apa yang ada, menurut saya, penyelenggaraan pilkada-nya itu lebih penting," ujar Ma'ruf.

Untuk informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Kemudian, pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024. Lalu, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024.

Diketahui, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menekan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU. Hal ini diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan periode 2022-2027," kata Ari kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).



(Ilustrasi) Persiapan Pilkada 2024, pantarlih menempelkan stiker Coklit di bagian rumah Pemilih yang didatangi. (sok)

DKPP menyatakan Hasyim Asy'ari bersalah karena dinilai melanggar kode etik. Putusan itu dibacakan DKPP pada Rabu (3/7).

Hasyim menjadi satu-satunya teradu dalam perkara ini atas laporan dalam perkara ini atas laporan dugaan tindak asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT.

Dalam amar putusannya, Majelis Sidang DKPP mengabulkan permohonan pengadu. DKPP menilai tindakan Hasyim terhadap pelapor di luar kewajaran antara atasan dan bawahan.

"Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat membacakan amar putusan.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhingga sejak putusan ini dibacakan," lanjut Heddy.

Hasyim disebut memberikan fasilitas khusus kepada pengadu untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan eksploitasi seksual terhadap pengadu pada saat bimbingan teknis PPLN Den Haag di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Hasyim dinilai tidak menjaga kehormatan dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu oleh pengadu.

Menanti Sosok Pengganti

Terkait pengisian satu posisi kosong komisioner KPU, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi harus meminta nama pengganti kepada DPR RI.

"(Presiden) mengajukan dan

meminta pada DPR untuk penggantian antar waktu ya dari tujuh orang yang tidak terpilih ketika mengikuti seleksi tahun 2022 yang ada di DPR," kata Fadli.

Selanjutnya, menurut dia, Presiden Jokowi harus segera mengangkat dan melantik komisioner PAW tersebut sehingga komposisi komisioner KPU menjadi lengkap tujuh orang. Untuk diketahui, ada tujuh nama yang ditetapkan menjadi cadangan hasil fit and proper test atau uji kelayakan anggota KPU periode 2022-2027 di Komisi II DPR RI pada 17 Februari 2024.

Ketujuh nama yang masuk dalam daftar cadangan itu adalah Viryan, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, dan Muchamad Ali Safa'at.

Namun, Presiden Jokowi diketahui belum melakukan permintaan nama pengganti anggota KPU ke DPR RI.

Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengungkapkan mekanisme penggantian Hasyim Asy'ari yang dipecat sebagai Komisioner KPU atas putusan DKPP. Guspardi menyebut secara mekanisme, pengganti Hasyim sebagai Komisioner KPU adalah Iffa Rosita.

Guspardi menjelaskan pengganti Hasyim tidak perlu lagi fit and proper test atau uji kelayakan. Guspardi menyebut komisioner pengganti Hasyim bisa ditunjuk dari calon anggota nomor urut 8 saat uji kelayakan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada Februari 2022 lalu.

"Sudah ada mekanismenya, yaitu digantikan nomor urut 8. Jadi urut di mana ketika kami melakukan fit and proper test," ujar Guspardi di

kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).








"Ya, ya betul (Iffa Rosita)," tambahnya.

Iffa Rosita dalam fit and proper test Komisi II DPR sebelumnya berada pada urutan kedua atau ke-9 sebagai cadangan komisioner. Kendati demikian, posisi pertama cadangan atau urutan ke-8, Viryan, diketahui telah meninggal dunia. Nama Iffa pun naik ke atas.

"Yang ketika itu dari pihak pemerintah memberikan alokasi 2 kali lipat dari jumlah kuota komisioner yang ada jadi dikirim oleh Timsel sebanyak 14 orang, kami menetapkan 7 orang," ujar Guspardi.

"Manakala ada di antara komisioner yang dipilih itu meninggal, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana dan lain sebagainya itu akan digantikan oleh nomor urut 8 dan seterusnya," sambungnya. (wid,rls, ist,tmp/dya)

DAFTAR ANGGOTA KOMISIONER KPU

-  1. Betty Epsilon Idroos
-  2. Hasyim Asy'ari
-  3. Mochammad Afifuddin
-  4. Parsadaan Harahap
-  5. Yulianto Sudrajat
-  6. Idham Holik
-  7. August Mellaz

DAFTAR CADANGAN ANGGOTA KPU

-  8. Viryan Aziz (alm)
-  9. Iffa Rosita
-  10. Dahliah
-  11. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
-  12. Iwan Rompo Banne
-  13. Yessy Yatty Momongan
-  14. Muchamad Ali Safa'at